

"Informal Institutions: Prestige, Social Obligations, and Debt Bondage in the Dynamics of Human Trafficking (A Study on the *Kedde/Pangandi* Tradition in Sumba Island, East Nusa Tenggara)"

ABSTRACT

Andre Edwin Johannes

NIM : 19/450361/SSP/00394

This study addresses the interplay between informal institutions, notably prestige, social obligations, and debt bondage, and their role in shaping the preconditions for human trafficking, with a particular focus on the Kedde/Pangandi tradition in Sumba Island, East Nusa Tenggara (NTT). Two primary considerations underpin this research. From a theoretical standpoint, existing scholarship on anti-trafficking policy interventions predominantly emphasizes poverty, vulnerability, disasters, corruption, and governance failures. Nevertheless, there remains limited exploration of the influence of informal institutions—prestige, social obligations, and culturally embedded practices—and their role in facilitating human trafficking. Specifically, current literature rarely addresses how these cultural practices evolve and adapt within contemporary contexts, potentially exacerbating vulnerabilities rather than mitigating them. This study endeavors to bridge this gap by examining the evolution and adaptation of informal institutions and their inadvertent contributions to human trafficking vulnerabilities. Empirically, the research investigates human trafficking dynamics on Sumba Island, a region characterized by intricate and often hidden trafficking phenomena, frequently unreported due to prevailing social and cultural pressures. The study examines how entrenched informal institutions influence individuals' decisions, leading them into high-risk economic activities like debt bondage. This analysis explores how prestige, societal obligations, and debt-induced vulnerability interplay, exacerbating the susceptibility of individuals to trafficking and exploitation. Moreover, this investigation seeks to identify potential transformations within informal institutions that could mitigate, rather than intensify, individuals' exposure to exploitative circumstances. Central to this inquiry is the following research question: How do informal institutions create preconditions conducive to human trafficking? Findings indicate that informal institutions significantly influence the establishment of trafficking preconditions by fostering social pressures, prestige expectations, and obligatory reciprocity that frequently drive individuals toward precarious economic activities. These institutions often compel community members to accrue debts under disadvantageous terms to fulfill social obligations or uphold familial honor. As debts accumulate and repayment becomes untenable, affected individuals become increasingly susceptible to exploitation, frequently encountering employment opportunities lacking transparency or legal protections. Such conditions are aggravated by insufficient formal protective mechanisms, heightening the risk of human trafficking. Moreover, governmental responses reflect regional variations in policy prioritization and fiscal capabilities, with some regions emphasizing familial welfare and others emphasizing individual protective measures as central anti-trafficking strategies. Nonetheless, the overall effectiveness of these interventions is hindered by inadequate inter-regional coordination and

insufficient investment in employment creation and community development programs, suggesting an incomplete approach to addressing root vulnerabilities comprehensively. Critically, the limited integration and coordination across administrative boundaries further undermine the effectiveness of these preventive measures. Enhanced involvement by formal institutions—including social welfare agencies, labor departments, and central government authorities—is crucial for developing cohesive and integrated anti-trafficking policies. Additionally, post-trafficking victim support remains a significant issue, particularly concerning successful reintegration. Despite the governmental provision of rehabilitation services, the scarcity of specialized support personnel and fragmented community development initiatives impede comprehensive victim recovery, indicating a pressing need for more robust institutional coordination and targeted interventions. Ultimately, the study underscores the necessity of transforming informal institutions from factors exacerbating vulnerabilities into mechanisms of social resilience and protection against human trafficking.

Keywords: Informal Institutions, Prestige, Social Obligations, Debt Bondage, Human Trafficking.

**Kelembagaan Informal : Prestise, Kewajiban Sosial dan Jeratan Hutang dalam
Dinamika Perdagangan Manusia
(Studi pada tradisi Kedde/ Pangandi di pulau Sumba, NTT)**

INTISARI

Andre Edwin Johannes
NIM : 19/450361/SSP/00394

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kelembagaan informal, khususnya prestise, kewajiban sosial, dan jeratan utang, serta perannya dalam menciptakan pra-kondisi perdagangan manusia, dengan fokus pada tradisi Kedde/Pangandi di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ada dua aspek utama yang melatarbelakangi penelitian ini. Secara teoritis, kajian sebelumnya tentang kebijakan pencegahan perdagangan manusia umumnya didominasi oleh isu kemiskinan, kerentanan sosial, bencana, korupsi, serta persoalan keamanan negara. Namun, masih sedikit kajian yang mendalami pengaruh faktor budaya sebagai elemen penting dalam mendorong individu terjatuh dalam jaringan perdagangan manusia. Lebih jauh lagi, kajian terdahulu seringkali memandang kelembagaan informal seperti praktik kekerabatan dan tradisi kerja kolektif hanya sebagai faktor pendukung perdagangan manusia, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana praktik tersebut berevolusi atau beradaptasi dalam konteks kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi evolusi dan adaptasi kelembagaan informal yang secara tidak langsung turut memperkuat kerentanan terhadap perdagangan manusia. Secara empiris, penelitian ini menganalisis kasus perdagangan manusia di Pulau Sumba yang merupakan fenomena kompleks dan tersembunyi, dengan banyak kasus yang tidak terungkap akibat tekanan sosial dan budaya yang menghambat pelaporan dan intervensi hukum. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kelembagaan informal, khususnya tradisi kedde, mendorong individu mengambil keputusan berisiko tinggi secara ekonomi, seperti terjebak dalam jeratan utang. Analisis ini mengungkap bagaimana prestise, kewajiban sosial, dan jeratan utang saling terkait memperparah risiko eksploitasi dan perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi potensi transformasi kelembagaan informal agar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial yang efektif, bukan sebagai faktor pemicu eksploitasi. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kelembagaan informal berkontribusi pada terbentuknya situasi pra-kondisi perdagangan manusia?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan informal berperan besar dalam menciptakan situasi yang memudahkan terjadinya perdagangan manusia melalui mekanisme sosial-ekonomi yang kompleks, terutama pada masyarakat dengan stratifikasi sosial yang makin egaliter. Dalam konteks ini, norma adat yang menekankan kewajiban sosial dan pencapaian status sosial memperkuat tekanan pada individu maupun keluarga untuk memenuhi ekspektasi komunitas, seperti memberikan kontribusi ekonomi tertentu. Dalam masyarakat berpenghasilan rendah, tekanan ini sering mendorong individu mencari sumber pendapatan dengan risiko tinggi, termasuk terlibat dalam utang dengan syarat yang tidak menguntungkan. Ketika utang tersebut semakin sulit dilunasi, individu yang bersangkutan menjadi rentan terhadap eksploitasi, termasuk perdagangan manusia, karena terpaksa menerima tawaran pekerjaan yang tidak jelas dan berada di luar jangkauan perlindungan hukum. Situasi ini semakin parah karena kurangnya sistem perlindungan formal yang memadai, membuat individu dalam tekanan sosial-ekonomi memiliki pilihan terbatas dan lebih mudah

dimanipulasi. Dalam upaya mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang berbeda-beda untuk pencegahan perdagangan manusia, mencerminkan perbedaan prioritas kebijakan dan kapasitas fiskal di masing-masing wilayah. Beberapa daerah lebih menekankan program kesejahteraan keluarga, sementara daerah lain fokus pada perlindungan individu sebagai strategi utama dalam mencegah eksploitasi. Namun, efektivitas dari strategi tersebut masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar daerah serta rendahnya investasi dalam program ketenagakerjaan dan pengembangan masyarakat, yang menyebabkan akar masalah belum sepenuhnya terselesaikan. Pemerintah juga berupaya mengurangi beban kewajiban sosial dalam budaya kedde melalui sosialisasi dan program bantuan. Akan tetapi, implementasinya menghadapi tantangan besar akibat kuatnya pengaruh budaya lokal yang erat kaitannya dengan agama Marapu. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan institusi formal seperti dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dan pemerintah pusat guna menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi. Selain upaya pencegahan, penanganan korban perdagangan manusia juga menjadi isu penting, khususnya dalam proses reintegrasi sosial korban. Walaupun pemerintah telah menyediakan layanan rehabilitasi, keterbatasan tenaga ahli, minimnya koordinasi antar lembaga, serta tekanan ekonomi yang masih tinggi menyebabkan korban seringkali kembali dalam situasi rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan dan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan guna secara efektif memutus siklus eksploitasi dan perdagangan manusia.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Kelembagaan Informal, Kewajiban Sosial, Prestise Sosial, Jeratan Utang.